

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

ALUI JARO

NPM : 08 840 0035

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penegasan judul yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan penegakan hukum yang diterapkan dalam mengungkapkan suatu kasus atau tindak pidana pembunuhan berencana dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana serta bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pembunuhan berencana.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan berencana tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan berencana tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.

Sedangkan saran yang diajukan adalah: Kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa pembunuhan berencana yang dewasa ini semakin berkembang polanya dan adanya upaya menghilangkan identitas korban seperti pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian perkara sehingga suatu tindak pidana pembunuhan kehilangan bukti hendaknya pihak kepolisian dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.